

# Indonesia's Role in the Confidence Building Measures Instrument in the Russia-Ukraine War

Popy Maharanie<sup>1</sup>, Gregory Henry Erari<sup>2</sup>, Prilla Marsingga.,S.IP.,M.I.Pol<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Social and Political Science, State, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia. E-mail: [2110631260036@student.unsika.ac.id](mailto:2110631260036@student.unsika.ac.id)

<sup>2</sup> Faculty of Social and Political Science, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia. E-mail: [2110631260024@student.unsika.ac.id](mailto:2110631260024@student.unsika.ac.id)

<sup>3</sup> Faculty of Social and Political Science, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia. E-mail: [prilla.marsingga@fisip.unsika.ac.id](mailto:prilla.marsingga@fisip.unsika.ac.id)

**Abstract:** *The conflict between Russia and Ukraine has been in the world spotlight since the conflict began in 2014. In 2024, Indonesia has the opportunity to become president of the Conference on Disarmament (CD) which shows its involvement in the world peace mission. In this context, Confidence Building Measures (CBM) are important to ease tensions and promote constructive dialogue between the two parties. This article examines Indonesia's role as one of the parties that has the potential to contribute to supporting CBMs in the conflict and evaluates the concrete steps that have been taken by Indonesia in an effort to mediate and facilitate dialogue between Russia and Ukraine. In this context, factors such as Indonesia's diplomatic history with both countries, foreign policy principles, and potential role as a regional mediator are considered. This study aims to provide insight into Indonesia's potential role in easing complex international conflicts, as well as the possible implications of Indonesia's involvement in CBMs efforts between Russia and Ukraine.*



**Keywords:** Confidence Building Measures, Rusia, Ukraina, Manajemen Konflik

## 1. Introduction

Konflik merupakan kata yang dapat memiliki berbagai pemaknaan. Pemaknaan yang dilekatkan pada kata konflik akan sangat dipengaruhi oleh konteks atau penggunaannya. Konflik melibatkan posisi atau gagasan yang berbeda terkait dengan suatu isu, yang melibatkan dua orang atau lebih. Huan dan Yazdanifard (2012) mengemukakan bahwa konflik melibatkan dua individu atau lebih dalam proses komunikatif, yang menyebabkan terjadinya perselisihan atau interpretasi yang berbeda terkait dengan kata atau nilai yang ada. Konflik merupakan salah satu penyebab penting ketidakstabilan politik dan dampak buruknya kualitas kelembagaan dan tata kelola. Perang menghancurkan modal fisik, modal manusia, dan modal sosial. Ketiganya mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian dalam jangka panjang.

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Konflik yang diasumsikan terjadi karena adanya perbedaan maka kehidupan manusia tidak ada yang luput dari kondisi perbedaan itu sendiri. Perbedaan itu dapat Nampak dalam perbedaan gender, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, budaya serta tujuan hidupnya. Dalam perjalanan sejarah manusia, berbagai perbedaan ini dapat menjadi alas an terjadinya konflik.

Menurut Galtung konflik dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kekerasan langsung (Perilaku), kekerasan budaya (konstuksi sosial) dan kekerasan struktural (konstruksi sosial). Galtung juga berpendapat bahwa aspek budaya dan struktural konflik tidak terlihat, namun pada faktanya dua hal tadi memainkan peranan penting dalam tahapan pencegahan dan rehabilitasi tahap-tahap konflik. Tipologi kekerasan yang dibuat oleh Johan Galtung dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Violence, Peace, and Peace Research. Secara

garis besarnya, Galtung membagi kekerasan menjadi personal dan struktural. Kekerasan personal berhubungan dengan perilaku individu terhadap orang lain, perilaku ini dapat terlihat dalam bentuk tindakan kekerasan, melakukan pelecehan, mengintimidasi, melakukan tindakan perusakan property pribadi serta bentuk tindakan lainnya yang relevan. Sedangkan disisi lain, yang dimaksud dengan kekerasan structural merupakan bentuk kekerasan yang tidak dilakukan oleh seseorang sebagai individu melainkan kekerasan yang dilakukan oleh struktur social yang ada dalam masyarakat. Bentuk dari kekerasan structural dapat dilakukan oleh pemerintah atau organisasi yang sedng berkuasa kemudian melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Tindakan yang merugikan masyarakat ini dapat dilakukan melalui bentuk distriminasi.

Konflik yang terjadi dalam sejarah memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya dapat disebabkan oleh alasan tunggal seperti perebutan wilayah. Setidaknya terdapat tiga sumber konflik yang menjadi factor penyebab terjadinya konflik di berbagai wilayah di dunia hingga saat ini. Pertama, konflik identitas, identitas dapat dimaknai sebagai ciri khas atau jati diri seseorang yang melekat pada orang tersebut yang kemudian membedakannya dari orang lain. Identitas ini kemudian menjadi dasar bagi perilaku individu. Perilaku tersebut dapat terdiri atas kebiasaan, sikap, sifat serta karakter yang ada pada diri individu. Setiap individu dengan demikian akan memiliki identitas yang beragam. Perbedaan identitas dengan kepentingannya masing-masing yang cenderung berbeda dapat menjadi sumber konflik.

Kedua, konflik atas wilayah, konflik atas wilayah merupakan salah satu sumber penyebab konflik yang paling banyak terjadi. Dalam perjalanan sejarah kepentingan negara di dunia untuk melakukan upaya perluasan wilayah kekuasaan mengakibatkan terjadinya penjajahan dan bahkan perang dengan negara lain untuk memperoleh kekuasaan atas wilayah tertentu. Konflik memperebutkan wilayah masih eksis sampai saat ini yang dapat dicermati dari konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina yang berkonflik untuk memperebutkan wilayah di Jalur Gaza.

Ketiga, konflik sumberdaya, Ismail Serageldin, Vice Presiden of World Bank pada tahun 1995 telah menyatakan bahwa dimasa depan, perebutan atas sumber daya tertentu akan menjadi sumber konflik yang banyak terjadi. Konflik sumberdaya merupakan konflik yang berlangsung terkait dengan upaya yang dilakukan oleh actor negara maupun actor non negara untuk mampu menguasais umber daya alam.

Dalam konteks konflik antara Rusia dan Ukraina, konflik struktural dapat berkaitan dengan persaingan atas sumber daya seperti gas alam dan kontrol wilayah yang kaya sumber daya. Konflik budaya mungkin terjadi karena perbedaan historis, bahasa, budaya, dan identitas nasional antara dua negara tersebut. Sedangkan kekerasan langsung mencakup tindakan fisik yang terjadi dalam konflik tersebut, seperti pertempuran militer atau tindakan kekerasan lainnya yang terjadi di wilayah Ukraina Timur yang disengketakan. Galtung mungkin akan melihat konflik Rusia-Ukraina sebagai hasil dari ketidaksetaraan struktural dan konflik budaya yang kemudian memunculkan kekerasan langsung sebagai akibatnya.

Salah satu contoh konflik yang saat ini menjadi perhatian public adalah konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Konflik antara kedua negara ini tidak saja menjadi perhatian kedua negara ataupun negara di Kawasan tetapi telah menjadi perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia. konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini ditandai dengan adanya perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Konflik yang terjadi tentu berpotensi membawa kerugian tidak hanya bagi negara yang terlibat konflik tetapi juga bagi negara lainnya. Dampak negative konflik antara Rusia dan Ukraina ini Nampak dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Potensi kerugian sebagai dampak dari konflik yang berlangsung perlu untuk ditangani segera. Salah satu wujud upaya untuk menangani potensi kerugian tersebut adalah dengan menghentikan konflik yang sedang berlangsung. Dengan demikian,

tulisan ini kemudian akan menganalisis lebih jauh tentang upaya dan peran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan perdamaian dan meredakan konflik melalui gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina.

Pada dasarnya, Rusia dan Ukraina memiliki sejarah Panjang Bersama. Kedua negara tersebut merupakan negara yang tadinya merupakan bagian dari negara yang sama yakni Uni Soviet. Runtuhnya Uni Soviet pada 26 Desember 1991, menjadikan negara dengan wilayah yang besar tersebut terpecah menjadi 15 negara merdeka, diantaranya adalah Rusia dan Ukraina. Tetapi, walaupun berasal dari negara yang sama, Rusia dan Ukraina ternyata memiliki sejarah konflik yang Panjang. Akar konflik ini dapat ditelusuri pada awal keruntuhan Uni Soviet. Ukraina berdiri sebagai negara merdeka pada tahun 1991 pasca keruntuhan Uni Soviet, kemerdekaan Ukraina ini ditandai dengan Referendum Ukraina pada Desember 1991, hal ini tidak hanya menjadi penanda kemerdekaan Ukraina tetapi juga menjadi awal dari runtuhnya persatuan antara Rusia, Ukraina dan Belarusia. Konflik mulai semakin Nampak terjadi pada tahun 2014, hal ini ditandai dengan terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok Pro Rusia dan Pro Pemerintah. Demonstrasi ini terjadi di wilayah timur dan selatan Ukraina yakni wilayah Donetsk dan Luhansk. Menanggapi demonstrasi ini, pemerintah Ukraina melakukan serangan militer balasan terhadap kelompok pemberontak yang pada akhirnya berimplikasi pada mengemukanya konflik bersenjata di wilayah Donbass.

Konflik Panjang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina pada masa itu, telah menjadi perhatian dunia internasional. Beberapa negara kemudian berupaya untuk menjadi mediator pada konflik yang terjadi. Salah satu negara yang ikut terlibat adalah Perancis dan Jerman. Kedua negara ini menjadi mediator dalam konflik yang terjadi. Upaya penyelesaian konflik kemudian diwujudkan melalui Perjanjian Minsk. Tetapi, perjanjian perdamaian ini tidak berjalan seperti yang diharapkan, konflik tetap berlangsung di Donbass sampai saat ini.

Konflik yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina saat ini juga dipicu oleh adanya keinginan Ukraina untuk bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization (NATO) yang merupakan aliansi militer yang beranggotakan 28 negara di Eropa dan Amerika Utara. Hal ini mendapatkan penentangan dari Rusia karena secara geografis, Ukraina merupakan negara dengan posisi yang sangat penting bagi pertahanan Angkatan laut Rusia. Dalam pandangan Presiden Rusia Vladimir Putin, dengan posisi yang sangat strategis ini maka seharusnya Ukraina terbebas dari ancaman atau intervensi kekuatan lain. Dengan demikian, jika Ukraina bergabung dengan NATO maka eksistensi kekuatan militer yang dibangun oleh NATO di wilayah perbatasan Rusia kemudian dipandang sebagai ancaman nyata bagi keamanan Rusia. Hal inilah yang melatarbelakangi Vladimir Putin sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Rusia memerintahkan dilakukannya operasi militer khusus di wilayah Ukraina.

## **2. Method**

Metode penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten serta memecahkan masalah untuk mendapatkan hasil akhir (Iqbal, 2021). Metode merupakan elemen penting dalam membahas suatu masalah. Tulisan ini kemudian disusun dalam kerangka penelitian deskriptif kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini mengeksplorasi dan memahami arti dari perilaku individu dan kelompok dalam mendeskripsikan masalah sosial atau kemanusiaan. Argumentasi dalam tulisan ini didukung dengan data sekunder. Data sekunder dalam tulisan ini adalah data yang diperoleh melalui dokumen yang relevan yang dapat berasal dari buku, jurnal, serta informasi dari pemberitaan yang ada terkait dengan isu konflik antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung.

## **3. Result and discussion**

Manajemen konflik adalah proses mengelola konflik yang timbul di antara individu, kelompok, atau entitas lainnya. Tujuan dari dilakukannya manajemen konflik adalah untuk mengidentifikasi, mencegah, atau menyelesaikan konflik dengan cara yang meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan potensi positifnya. Upaya manajemen konflik yang dilakukan ini melibatkan berbagai strategi seperti komunikasi efektif, negosiasi, mediasi, dan kolaborasi untuk mengelola perbedaan pendapat, kepentingan, atau kebutuhan yang mungkin bertentangan. Praktik manajemen konflik yang baik dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis.

Dalam konteks konflik antara Rusia dan Ukraina, manajemen konflik menjadi sangat penting untuk mencoba mengendalikan situasi yang tegang dan meminimalkan dampak negative dari konflik yang berlangsung. Berbagai strategi manajemen konflik yang dapat diterapkan diantaranya adalah diplomasi, negosiasi, mediasi, dan upaya untuk membangun dialog yang konstruktif antara kedua belah pihak yang berkonflik. Negosiasi diplomatik dapat menjadi sarana untuk mencari solusi damai dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi dari pihak ketiga yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh negara ataupun organisasi non negara seperti organisasi internasional dapat membantu untuk mengurangi ketegangan dan membantu dalam upaya fasilitasi proses perdamaian yang akan dilakukan.

Salah satu contoh bentuk penyelesaian manajemen konflik adalah CBM atau Confidence Building Measures. Confidence Building Measure (CBM) adalah suatu tindakan yang dapat digunakan untuk mengatasi, mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara negara (Centre for Strategic & International Studies, 2019). Definisi dari CBM ini sendiri adalah prosedur terencana untuk mencegah permusuhan, mencegah eskalasi, mengurangi ketegangan militer, dan membangun rasa saling percaya antar negara atau tindakan yang mengatasi, mencegah, atau menyelesaikan ketidakpastian antar negara. Dirancang untuk mencegah peningkatan permusuhan yang diinginkan dan terutama tidak diinginkan serta membangun rasa saling percaya. CBM dapat bersifat formal/informal, unilateral, bilateral/multilateral, militer/politik, dan dapat bersifat antar negara/non-pemerintah.

CBM sebagai salah satu bentuk manajemen konflik dapat digunakan dalam rangka upaya untuk mencegah terjadinya peningkatan masalah dan juga dapat digunakan untuk membangun rasa saling percaya antar negara yang berkonflik. Dengan demikian, maka perlu untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana Indonesia berperan untuk penyelesaian perang antara Rusia dan Ukraina dalam kerangka Confidence Building Measures.

Politik luar negeri bebas aktif yang menjadi prinsip penting dalam mengarahkan perilaku Indonesia sebagai negara yang Merdeka dalam interaksinya dengan negara lain serta bagaimana Indonesia memberikan respon atas konstelasi politik internasional yang sedang berlangsung. Dengan demikian, dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina Indonesia dapat mengambil peran sebagai Confidence Building Measures (CBM). Dalam hal ini Indonesia dapat berperan sebagai mediator ataupun fasilitator antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Upaya Indonesia untuk menjadi mediator dalam kerangka Confidence Building Measures ini juga sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945.

Indonesia dapat berperan sebagai mediator ataupun fasilitator dalam konflik Rusia dan Ukraina karena selama ini Indonesia dipandang sebagai negara yang netral dan tidak terlibat secara langsung dalam konflik geopolitik yang sedang berlangsung. Selain itu, Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan

Rusia dan Ukraina. Dengan hubungan baik yang dimiliki Indonesia dengan dua negara yang sedang berkonflik tersebut maka Indonesia dapat membangun kepercayaan melalui proses dialog, diplomasi public dan upaya lainnya dalam kerangka Confidence Building Measures (CBM).

Selain asas politik luar negeri bebas aktif, serta tujuan negara Indonesia, hal lain yang menjadikan Indonesia penting untuk berperan aktif dalam upaya penyelesaian konflik Rusia Ukraina adalah posisi Indonesia sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu badan PBB yang memiliki tugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, peran Indonesia untuk membantu menciptakan perdamaian dunia tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga sebagai tanggungjawab moral sebagai anggota Dewan Keamanan PBB.

### **3.1. Pertemuan Presiden Indonesia dengan Presiden Ukraina dan Rusia**

Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk berperan dalam upaya menciptakan perdamaian terkait konflik Rusia dan Ukraina adalah dengan Tindakan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di istana Maryinsky, Kyiv Ukraina pada 29 Juni 2022. Pertemuan yang diselenggarakan oleh kedua kepala negara membahas tentang kepedulian Masyarakat Indonesia terhadap konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan Presiden Jokowi menjelaskan tentang posisi Indonesia dalam konflik yang berlangsung. Dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati pentingnya kedaulatan dan integritas negara atas suatu wilayah. Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan penting dalam pertemuan yang dilakukan, yakni bahwa penyelesaian damai adalah aspek penting dan masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik perlu untuk menjaga semangat perdamaian.

Selain melakukan pertemuan dengan Presiden Ukraina membahas tentang upaya perdamaian. Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Melalui pertemuan ini. Presiden Joko Widodo membahas tentang upaya perdamaian dengan Ukraina. Selain membahas konflik yang sedang berlangsung, Presiden Jokowi dan Presiden Putin juga membahas tentang Krisis pangan yang membawa implikasi negative pada ketersediaan pangan utamanya di negara berkembang yang mempengaruhi kehidupan jutaan manusia.

Pertemuan yang antara Presiden Jokowi dan Presiden Putin dilaksanakan di Istana Kremlin di Moskow. Dalam pertemuan yang berlangsung dibahas juga terkait dengan prioritas politik luar negeri Indonesia yang senantiasa terkait dengan isu perdamaian dan kemanusiaan serta amanat konstitusi Indonesia terkait dengan upaya dan peran Indonesia untuk menciptakan perdamaian dimuka bumi.

Tujuan dari kunjungan yang dilakukan Presiden Jokowi di Rusia dan Ukraina adalah untuk mendorong dialog yang kooperatif dengan menjadikan isu kemanusiaan sebagai pertimbangan penting, hal ini utamanya terkait dengan krisis pangan yang terjadi sebagai salah satu implikasi dari konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Terkait dengan kondisi ini penting untuk memastikan upaya untuk memulihkan rantai pasokan pangan. Selain itu, melalui kunjungan yang dilakukan Presiden Jokowi juga menegaskan tentang pentingnya untuk menjaga kolaborasi antara Indonesia, Rusia dan Ukraina sebagaimana Indonesia yang telah berperan sebagai tuan rumah G20 pada tahun 2022, yang mana pertemuan ini mencerminkan intensi Indonesia untuk dapat berkontribusi positif dalam upaya penyelesaian konflik dengan memberikan pesan damai pada kegiatan tersebut.

Dengan demikian, Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat dan memiliki tanggungjawab moral untuk menciptakan perdamaian dunia menekankan pada pentingnya Solusi damai untuk setiap konflik

yang terjadi, dalam hal ini adalah konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Indonesia juga membuka diri untuk berperan sebagai mediator antara kedua kepala negara yang sedang terlibat konflik.

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia, terlihat bahwa Indonesia melakukan berbagai tindakan yang sejalan dengan tujuan CBM dalam Konflik Rusia dan Ukraina ini. Dimana tujuan dari CBM adalah untuk menyesuaikan persepsi motif yang mungkin tidak akurat antara dua negara atau lebih, untuk menghindari kesalahpahaman tentang tindakan dan kebijakan militer, dan untuk mendorong kerja sama dan saling ketergantungan. Jangka panjang, CBM dapat membuka jalan bagi hubungan bilateral yang lebih stabil, mengubah gagasan mengenai persyaratan keamanan nasional, dan bahkan mendorong langkah-langkah untuk bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan keamanan bersama. Sama seperti yang Indonesia lakukan demi perdamaian untuk konflik Rusia dan Ukraina

### **3.2. 3.2. Indonesia sebagai Presiden Conference on Disarmament (CD)**

Conference on Disarmament (CD) merupakan suatu forum kerja sama multilateral utama yang didirikan pada tahun 1979. Forum ini memiliki tujuan untuk negosiasi perjanjian internasional dalam bidang perlucutan senjata, termasuk senjata pemusnah massal. Saat ini CD beranggotakan 65 negara dengan yang masing-masing negara memiliki kemampuan militer yang cukup signifikan, salah satu bagian dari Forum ini adalah Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia dalam Conference on Disarmament diwakili oleh Duta Besar Indonesia yang juga menjabat sebagai Presiden Konferensi Perlucutan Senjata atau Conference on Disarmament (CD), Febrina A. Ruddyard. Conference on Disarmament dihadiri oleh pejabat negara dan PBB seperti Sekretaris Jenderal PBB, pimpinan organisasi Internasional seperti Sekretaris Eksekutif Organisasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (CTBTO), serta Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi. Conference on Disarmament, sebagai forum kerja sama multilateral utama untuk perundingan perjanjian internasional terkait perlucutan senjata, telah berperan penting dalam pengembangan perjanjian penting seperti Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), Konvensi Pelarangan Senjata Biologi (BTWC), Konvensi Pelarangan Senjata Kimia (CWC), dan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (CTBT).

Menghadapi tantangan global yang kompleks dalam konteks perlucutan senjata, Presidensi Indonesia bertekad untuk memastikan agar konferensi ini tetap relevan dan responsif. Dengan mengidentifikasi beberapa tantangan utama saat ini, Indonesia bertujuan untuk mendorong kemajuan signifikan dalam implementasi komitmen perlucutan senjata nuklir, mengatasi retorika dan potensi penggunaan senjata nuklir, mengurangi ketertarikan negara terhadap aliansi militer, serta memperkuat komitmen negara pemilik senjata nuklir dalam pelucutan senjata.

Indonesia melihat dalam menjadi presidensi CD ini sebagai kesempatan penting untuk menegaskan peran kepemimpinan dalam mendorong perdamaian dan juga keamanan global melalui agenda perlucutan senjata. Presidensi ini juga akan fokus kepada revitalisasi kemauan politik, pembangunan kepercayaan, serta pengurangan ketidakpercayaan antarnegara, dengan upaya untuk menjembatani perbedaan dan polarisasi yang ada. Presidensi Indonesia di CD menandai langkah signifikan dalam upaya global menuju transformasi perlucutan senjata, khususnya senjata pemusnah massal dan mewujudkan perdamaian serta keamanan dunia yang lebih aman.

## **4. Conclusion**

Indonesia dapat menggunakan platform diplomasi multilateral seperti PBB dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa untuk memfasilitasi dialog antara Rusia dan Ukraina. Indonesia juga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam mengadakan dialog langsung antara kedua belah pihak untuk memperkuat saling pengertian dan mencari solusi damai. Indonesia dapat mendukung upaya-

upaya diplomatik yang dipimpin oleh komunitas internasional untuk mencapai solusi politik yang adil dan berkelanjutan bagi konflik tersebut.

Dengan demikian, meskipun Indonesia tidak langsung terlibat dalam konflik Russia dan Ukraina, namun sebagai negara yang aktif dalam diplomasi internasional, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain yang berpengaruh dalam membangun kepercayaan antara kedua belah pihak dan mendorong penyelesaian damai konflik tersebut.

Terlihat dari upaya yang sudah dilakukan oleh Indonesia demi terwujudnya perdamaian dunia, Indonesia memegang peran yang penting sebagai jembatan komunikasi antar kedua negara yang sedang konflik tersebut. Dengan berbagai tantangan yang ada seperti, regulasi hukum CBM ini karena Tidak ada garis panduan yang jelas mengenai kepatuhan hukum dalam penerapan CBM, sehingga mekanisme pengendalian senjata dan kebijakan yang dapat mengakibatkan eskalasi konflik belum terpenuhi. Tetapi Indonesia tidak hanya diam dan tetap ikut andil dalam konflik ini.

### **References**

- Barker, D. (2019). Indonesia as a mediator: Opportunities and challenges. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 71-91.
- Biro Pers, m. d. (2023, mei 21). Bertemu Presiden Zelenskyy, Presiden Jokowi: Indonesia Terus Dukung Perdamaian di Ukraina.
- Indonesia, S. K. (2022, July 01). Bertemu dengan Presiden Putin, Presiden Jokowi: Indonesia Siap Menjembatani Komunikasi Rusia-Ukraina.
- Kurnia, K., & Wibisono, A. A. (2019). Analisis Dinamika Confidence Building Measures (CBM) terhadap Senjata Nuklir India-Pakistan. Universitas Indonesia Library.
- M. Harvien Gilang. P. (2019). Confidence Building Measures. Peran Confidence Building Measures (CBMs) Sebagai Instrumen Resolusi Konflik ASEAN (Studi Kasus : Konflik Kuil Preah Vihear).
- Mietzner, M. (2018). Indonesia's emerging role in the Indo-Pacific: Perceptions and policies. *The Pasific Review*, 779-801.
- Nathan, L. (2017). Indonesia's role in international mediation: a historical perspective. *World Scientific*, 53-72.
- Pratama, A. (2023). Upaya Confidence Building Measures (CBM) Tiongkok dan India dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan 2013-2020. Universitas Laampung, 2- 43.
- Riccarda Flemmer, Verena Gresz & Jonas Hein (2024) What Is at Stake? The Ontological Dimension of Environmental Conflicts, *Society & Natural Resources*, 37:5, 608-622, DOI: 10.1080/08941920.2024.2329888
- Sugiyanti, T. P., & Yuniasih, T. (2022). Confidence Building Measure (CBM) Korea Selatan terhadap Tiongkok. 168-172.